

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ecpat, 2010, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, Restu Printing Indonesia, Sumatera Utara.
- Eddyono, Supriyadi W, 2005, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X 2005: Pengantar Konvensi Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Hartono, 2002, *Bagaimana Menulis Tesis?; Petunjuk Komprehensif Tentang Isi dan Proses*, UMM Press, Malang.
- Hendratno, Edie Toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian beberapa Perda tentang Penanaman Investasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurnia, Mahendra Putra, *et al.*, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Muluk, Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS press, Surabaya.
- Redaksi Warta Depok, 2012, *Semangat Membangun Kota Layak Anak*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Kota Depok.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah dan Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunarno Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuwono, Sony, *et al.*, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya, Panduan mengelola keuangan daerah*, Bayu Media Publishing, Malang.

B. Jurnal

- Aminoto, “Desentralisasi dan Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, *Mimbar Hukum*, Volume II, Nomor 34, 2000.

C. Hasil Penelitian

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011, *Data Pilah Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2011*, Hasil Penelitian, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012, *Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012*, Hasil Penelitian, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, *Kompilasi Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2013*, Hasil Penelitian, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

D. Makalah

- I Made Utama, “Konsep Pembangunan Global dan Nasional Perlindungan Anak”, *Pidato*, Seminar Nasional World Fit for Children dalam Rangka Dies Natalis UNDIP ke 55, Semarang, 6 Oktober 2012



E. Artikel Internet

Redaksi Elsam, “Mengenal Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak”, <http://www.elsam.or.id/mobileweb/article.php?act=content&m=16&id=2819&cid=6024&lang=in>, diakses 5 Februari 2015.

Hamid Patilima, “Kota Layak Anak”, http://www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=134:kota-layak-anak&catid=56:artikel&Itemid=77, diakses 7 Februari 2015.

Redaksi jogjakota.go.id, “Kota Yogyakarta Dapat Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya”, <http://www.jogjakota.go.id/news/kota-jogja-dapat-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-madya>, diakses 8 Februari 2015.

Redaksi kla.or.id, “Kabupaten Malang Meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2013”, http://kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2252:kabupaten-malang-meraih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tingkat-madya-tahun-2013&catid=77:malang&Itemid=100, diakses 7 februari 2015.

Redaksi kla.or.id, “Pembentukan Kampung Ramah Anak Bagi Perwujudan Kota Yogyakarta Menuju Kota Layak Anak”, http://www.kla.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:pembentukan-kampung-ramah-anak-bagi-perwujudan-kota-yogyakarta-menuju-kota-layak-anak&catid=91:yogyakarta&Itemid=120, diakses 4 Maret 2015.

Redaksi Suara Merdeka, “Kota Harus Memperhatikan Hak Anak”, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/07/02/151178/Kota-Harus-Memperhatikan-Hak-Anak>, diakses 7 februari 2015.

Redaksi Jogja News, “Jogjakarta akhirnya berpredikat Kota Layak Anak”, <http://jogjanews.com/jogjakarta-akhirnya-berpredikat-kota-layak-anak>, diakses 15 februari 2015.

Redaksi Republika, “Lagi, Yogyakarta Sabet Penghargaan Kota Layak Anak Madya”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/10/03/mbbdg0-lagi-yogyakarta-sabet-penghargaan-kota-layak-anak-madya>, diakses 4 Februari 2015.

Redaksi Antara, “Kota Yogyakarta Pertahankan Predikat Kota Layak Anak”, <http://jogja.antaranews.com/berita/313992/kota-yogyakarta-pertahankan-predikat-kota-layak-anak>, diakses 8 Maret 2015.



Redaksi Antara, “Tim KLA kritik rendahnya pemberian ASI eksklusif”, <http://jogja.antaranews.com/print/312673/tim-kla-kritik-rendahnya-pemberian-asi-eksklusif>, diakses 5 Maret 2015.

Redaksi jogjakota.go.id, “Kota Yogyakarta Raih Penghargaan Kategori Madya Kota Layak Anak”, <http://www.jogjakota.go.id/news/kota-yogyakarta-raih-penghargaan-kla-2013-kategori-madya>, diakses 8 Maret 2015.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3).